

**RILIS KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPR RI
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024 – 2025
KE PROVINSI JAWA TIMUR
TANGGAL 6 – 10 DESEMBER 2024**

Komisi II DPR RI melaksanakan kegiatan kunjungan kerja reses ke Provinsi Jawa Timur pada tanggal 6 Desember 2024 dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan bidang tugas Komisi II DPR RI. Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI dipimpin oleh Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi II DPR RI/Fraksi Golkar Bapak Zulfikar Arse Sadikin, S.IP., M.Si. Kunjungan kerja spesifik hari ini diikuti juga oleh beberapa Anggota Komisi II DPR RI dari berbagai fraksi, dan didampingi pula oleh pejabat dari kementerian/lembaga yang menjadi mitra Komisi II DPR RI, yakni dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, dan Ombudsman RI (ORI).

Ketua Tim/Wakil ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin, S.IP., M.Si. menyampaikan bahwa pada kunjungan kali ini ingin mendapatkan saran dan masukan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan fungsi legislasi agenda revisi UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang telah masuk dalam Prolegnas 2024-2029. Selanjutnya terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Provinsi Jawa Timur yang meraih penghargaan peringkat 1 penyelenggaraan inovasi pelayanan publik di Indonesia. Terkait masalah pertanahan komisi II DPR RI mendukung percepatan kebijakan Kabupaten/Kota Lengkap dalam rangka mewujudkan one map policy serta mendorong Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur melaksanakan program 3 juta rumah untuk rakyat khususnya di Provinsi Jawa Timur.

Pj. Gubernur Jawa Timur menyampaikan bahwa pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 telah berjalan lancar, tertib dan aman. Saat ini 33 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur telah selesai melakukan rekapitulasi suara. Terdapat 5 kabupaten/kota yang melaksanakan Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada 4 Desember 2024 (Kabupaten Sampang, Kota Madiun, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Bondowoso). Pada Triwulan III tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 1.72% merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa. Provinsi Jawa Timur juga meraih peringkat 1 sebagai provinsi terinovatif pada Innovative

Government Award tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, Provinsi Jawa Timur telah memiliki 31 Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital yang tersebar di kabupaten/kota dengan 7 kabupaten/kota lainnya (Kabupaten Situbondo, Kabupaten Kediri, Kabupaten Ponorogo, Kota Madiun, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bondowoso, dan Kota Blitar) sedang dalam tahap pembangunan MPP Digital. Terkait program pertanahan dan tata ruang, capaian Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Jawa Timur sebesar 100% menduduki peringkat 1 nasional. Begitu pula dengan progress realisasi Surat Keputusan (SK) redistribusi tanah sudah 100% lengkap.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa telah menerima hingga 5 Desember 2024 telah menerima total 574 akses laporan. Rinciannya, 330 laporan masyarakat (LM) ditutup pada tahap penerimaan laporan (PVL) dan pemeriksaan, 8 laporan sederhana yang ditangani cepat melalui mekanisme respons cepat ombudsman (RCO), dan 236 konsultasi. Sampai saat ini belum ada laporan terkait pelaksanaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024 di Provinsi Jawa Timur. Pada pertemuan dengan Komisi II DPR RI kali ini Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga menyampaikan permohonan dukungan untuk renovasi kantor yang selama 7 tahun berstatus pinjam pakai dalam rangka meningkatkan kinerja dalam melakukan pengawasan pelayanan publik.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa capaian realisasi anggaran hingga saat ini sebesar 88.11%. Capaian PTSL sudah 100% dengan 866.252 bidang. Ada pula program sertipikat tanah wakaf dengan capaian 65.665 bidang berbentuk masjid, musola, dan rumah ibadah lainnya. Provinsi Jawa Timur sudah memiliki 14 Kabupaten/Kota Lengkap, dengan semakin banyak kabupaten/kota lengkap diharapkan dapat meminimalisir sengketa/konflik petanahan serta melancarkan penerimaan pajak. Terkait progress penyusunan Rencana Detail tata Ruang (RDTR) di Provinsi Jawa Timur, Sebanyak 46 RDTR yang terbit dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah dan sebanyak 32 RDTR yang terbit dalam bentuk Peraturan Daerah. Dari jumlah sebanyak 78 RDTR tersebut, terdapat 38 RDTR atau sebesar 46,15% yang telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).

Beberapa catatan yang disampaikan anggota Komisi II DPR RI pada kunjungan kerja reses ke Provinsi Jawa Timur antara lain:

1. Terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan penciptaan inovasi pelayanan publik yang dilakukan secara optimal di Provinsi Jawa Timur, Komisi II

DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang meraih penghargaan provinsi terinovatif peringkat 1 se-Indonesia

2. Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan percepatan pembangunan MPP Digital pada 7 kabupaten/kota dalam rangka penerapan pelayanan prima, efektif dan efisien, serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.
3. Dengan banyaknya laporan pengaduan Ombudsman RI di bidang pertanahan, Komisi II DPR RI mendorong Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur melakukan perbaikan pelayanan administrasi pertanahan sebagai upaya meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan.
4. Komisi II DPR RI mendukung upaya percepatan pemetaan bidang tanah melalui kebijakan kabupaten/kota lengkap di Provinsi Jawa Timur dalam rangka mewujudkan one map policy sebagai acuan pembangunan yang berkesinambungan.
5. Komisi II DPR RI meminta Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai upaya maksimal dalam menyukseskan program 3 juta rumah untuk rakyat khususnya di Provinsi Jawa Timur.
6. Terhadap sengketa/konflik agraria penguasaan tanah yang dilakukan PT. Wongsorejo dan kasus sengketa lahan di Kawasan TNI AL Grati yang merupakan lokasi sarana pertahanan, Komisi II DPR RI meminta Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur segera menyampaikan secara tertulis progress dan tindaklanjut penyelesaian konflik tersebut.
7. Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyediakan alokasi anggaran untuk renovasi kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu upaya meningkatkan kinerja pengawasan pelayanan publik.
8. Dalam rangka meminimalisir terjadinya potensi konflik kepentingan, Komisi II DPR RI meminta Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur tetap menjaga integritas dan profesionalitas dalam melakukan pengawasan pelayanan publik di instansi pemerintah daerah meskipun fasilitas kantor berasal dari hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
9. Dengan adanya revisi UU HKPD, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan masukan sebagai berikut:
 - a. Pembagian persentase Dana Bagi Hasil (DBH) harus merata di setiap daerah.
 - b. Penambahan persentase DBH minimal 5% (bukan 3%) untuk cukai rokok.

Kota Surabaya, 6 Desember 2024,

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Provinsi Jawa Timur.